

ABSTRAK

Sari, Herlina Hayu Kartika. 2011. *Strategi Perencanaan daerah berbasis partisipasi masyarakat pasca pemberlakuan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Studi di kab.Brebes).* Bagian HTN-HAN Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dr. Nurul Akhmad, SH., M.Hum dan Arif Hidayat, SHI.,MH.

Kata Kunci: Strategi Perencanaan Daerah, Partisipasi masyarakat ,Good Governance

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di Brebes diperlukan strategi perencanaan daerah pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional. Proses perencanaan daerah melibatkan partisipasi masyarakat karena partisipasi itu merupakan elemen utama dalam implementasi kebijakan desentralisasi. Untuk menghasilkan pembangunan daerah berkelanjutan, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, kebijakan pembangunan yang mengatasmakan kepentingan masyarakat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) Apa sajakah bentuk-bentuk perencanaan daerah di Pemerintah Daerah Kab.Brebes? 2) Bagaimanakah prosedur perencanaan daerah di Pemerintah Daerah Kab.Brebes? 3) Bagaimanakah strategi perencanaan daerah yang partisipatif guna mendukung *Good Governance*? Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui bentuk-bentuk perencanaan daerah di pemerintah daerah Kab.Brebes. 2) Untuk mengetahui prosedur perencanaan daerah di pemerintah daerah kab.Brebes. 3) Untuk mengetahui strategi perencanaan daerah yang partisipatif guna mendukung *Good Governance*. Metode yang digunakan dalam penelitian inia dalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan DPRD Kab.Brebes, Kasubbag Pembangunan setda Kab.Brebes, dan Staf Bappeda bagian perencanaan Kab.Brebes. Bentuk-Bentuk dari perencanaan daerah yang ada di Kabupaten Brebes adalah RPJMD Kab.Brebes, RPJPD Kab. Brebes, RKPD Kab. Brebes sesuai dengan keputusan dari bupati. Perencanaan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di daerah kab.Brebes dengan melihat berbagai prioritas atau kriteria-kriteria, mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, mempertimbangkan kondisi eksternal. Prosedur untuk menyusun perencanaan tersebut adalah Pengolahan data dan informasi, Penelaahan RTRW kabupaten Brebes dan RTRW kabupaten/kota lainnya, Analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten Brebes, Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten Brebes, Penelaahan RPJMD ,RPJPD dan RKPD kabupaten/kota lainnya, Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Brebes, Penelaahan RPJMD, RPJPD dan RKPD Kab.brebes, Perumusan penjelasan visi dan misi, Perumusan tujuan dan sasaran, Perumusan strategi dan arah kebijakan, Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah kabupaten Brebes, Penyusunan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, Penetapan Indikator Kinerja Daerah, Pembahasan dengan SKPD kabupaten brebes, Pelaksanaan forum konsultasi publik, Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran dan Penyelarasan program prioritas dan kebutuhan pendanaan. Strategi dari perencanaan daerah yang berbasis partisipasi masyarakat guna mendukung *good governance* adalah salah satunya dapat melihat visi dan misi dari bupati, melibatkan masyarakat dalam penyusunan perencanaan daerah yang ada di Kab.Brebes guna mendukung *good governance*. Dari keterlibatan masyarakat tersebut dapat diarahkan dan mengasilkan suatu strategi yang baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Strategi yang digunakan pemerintah kab.brebes untuk menyusun perencanaan daerah guna mendukung *good governance* adalah dengan cara pemberdayaan masyarakatdانسosialisasi program. Dalam hal ini strategi untuk pemberdayaan masyarakat dapat

dilakukan dengan cara meningkatkan pengetahuan dari aparaturnya agar perencanaan tersebut langsung mengena kepada masyarakat dan dari peningkatan tersebut maka dapat disusun secara jelas isi dari perencanaan tersebut yang mana dari penyusunan tersebut melihat prioritas-prioritas yang ada di masing-masing daerah.

